



Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Cerminan Pertumbuhan Ekonomi Dan Tata Kelola Yang Baik

Rasyidah¹, Dara Angreka Soufyan², Rimal Mahdani³, Diah Tri Wahyuni⁴, Irdayani⁵, Iwan Pelita Kasim⁶

¹ Badan Kepegawaian Aceh, Indonesia

^{2,3} Universitas Teuku Umar, Indonesia

⁴ Badan Pengelola Keuangan Daerah

⁵ Dinas Reintegrasi Kependudukan Aceh (DRKA)

⁶ DPMPSTP Penanaman Modal

*Corresponding author

E-mail addresses: rimalmahdani@utu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 31, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 06, 2024

Kata Kunci:

PDB; Corruption Perception Index; Kualitas Laporan Keuangan, Tata Kelola, Pemerintah Daerah.

Keywords:

PDB; Corruption Perception Index; Financial Report Quality; Good Governance, Local Government.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Menggunakan regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, CPI tidak memiliki pengaruh signifikan dalam model ini. Keterbatasan penelitian termasuk cakupan sampel yang terbatas dan penggunaan CPI sebagai satu-satunya indikator tata kelola. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan sampel dan menambahkan variabel lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

ABSTRACT

This study examines the impact of Gross Domestic Product (GDP) and the Corruption Perception Index (CPI) on the quality of local government financial reports in Indonesia. The results of the multiple linear regression indicate that GDP exerts a positive and significant influence on the quality of financial reporting. Nonetheless, CPI exerts minimal influence under this model. The study's limitations encompass restricted sample coverage and reliance on the CPI as the sole governance measure. Further research should aim to broaden the sample coverage and incorporate additional pertinent variables to enhance the comprehension of the determinants affecting the quality of financial reports.

1. PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang akurat dan transparan memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan di tingkat daerah menjadi prioritas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dua faktor utama yang diperkirakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan kapasitas fiskal dan kemampuan ekonomi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan (Muryanto et al., 2022). Di sisi lain, tata kelola yang baik, yang dapat diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (CPI), mengindikasikan tingkat integritas dan etika dalam pengelolaan keuangan publik. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tata kelola yang baik, dan kualitas laporan keuangan di tingkat daerah penting untuk diteliti guna memahami bagaimana kedua faktor ini dapat secara simultan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang kredibel (Alfaro, 2022).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap berbagai aspek tata kelola keuangan. PDB memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PDB dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan karena perusahaan yang beroperasi di lingkungan ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk menginvestasikan dalam sistem akuntansi yang lebih baik dan pelatihan bagi karyawan (Animah et al., 2020; Istutik et al., 2022). Selain itu, perusahaan yang beroperasi di daerah dengan PDB yang tinggi biasanya lebih transparan dalam laporan keuangan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan integritas laporan tersebut (Ayem & Wulandari, 2023). Selanjutnya, CPI juga berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Tingkat korupsi yang rendah, seperti yang diindikasikan oleh CPI yang tinggi, sering kali berhubungan dengan praktik corporate governance yang baik dan transparansi dalam laporan keuangan (Fatimah et al., 2020). Penelitian Safida et al. (2023) menunjukkan bahwa instansi yang beroperasi di lingkungan dengan tingkat korupsi yang rendah cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, karena ada insentif yang lebih besar untuk mematuhi standar akuntansi dan etika yang tinggi.

Namun, studi-studi ini meneliti kedua faktor tersebut secara terpisah. Keterkaitan antara PDB dan CPI sebagai faktor yang berkontribusi bersama terhadap kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah masih belum banyak diteliti. Penelitian yang menggabungkan kedua faktor ini di dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Sebagian besar studi yang ada lebih berfokus pada tingkat nasional atau pada sektor swasta, sementara di tingkat daerah terdapat perbedaan signifikan dalam hal tantangan dan karakteristik yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, meskipun tata kelola yang baik secara umum dikaitkan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, sedikit penelitian yang memberikan bukti empiris tentang bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh simultan PDB dan CPI terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan terhadap literatur tata kelola keuangan publik. Dengan menguji pengaruh simultan antara PDB dan CPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi dan tata kelola berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di daerah.

Good Governance

Good governance berperan penting dalam konteks pengukuran dan persepsi korupsi, serta kualitas laporan keuangan. *Good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penerapan *good governance* berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi korupsi di masyarakat (Sufyenisa & Khomsiyah, 2024) (Safkaur et al., 2019). *Corruption Perception Index* (CPI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik berdasarkan persepsi para ahli dan pebisnis. CPI sering kali dikritik karena hanya mencerminkan persepsi, bukan realitas korupsi yang terjadi (Gamlath, 2013). Namun, CPI tetap menjadi indikator penting yang menunjukkan hubungan antara *good governance* dan kualitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat *good governance* yang tinggi cenderung memiliki CPI yang lebih baik, yang menunjukkan rendahnya persepsi korupsi (Setyobudi & Setyaningrum, 2019)

Kualitas laporan keuangan yang tinggi penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diandalkan dan relevan bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat (Iskandar et al., 2024). Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara *good governance*, CPI, dan kualitas laporan keuangan, di mana peningkatan dalam satu aspek dapat mempengaruhi yang lainnya secara positif.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Salah satu aspek penting dalam teori ini adalah hubungan antara pembangunan manusia, liberalisasi keuangan, dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat berkontribusi pada produktivitas dan inovasi yang lebih tinggi (Putri et al., 2023). Selain itu, liberalisasi keuangan juga terbukti menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap modal dan meningkatkan efisiensi pasar (Wihardja & Jayadi, 2023).

Korupsi, di sisi lain, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian di ASEAN menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa semakin rendah tingkat korupsi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai (Ichvani & Sasana, 2019). Korupsi menghambat investasi dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan iklim bisnis, sehingga mengurangi daya tarik investasi asing dan domestik. Dalam konteks Indonesia, data menunjukkan bahwa korupsi secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi per kapita, dengan

tingkat investasi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Haldi, 2023) . Selanjutnya, UMKM berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Bahri et al., 2023).

Interaksi antara pembangunan manusia, liberalisasi keuangan, dan pengendalian korupsi sangat penting dalam teori pertumbuhan ekonomi. Negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan, mengurangi korupsi, dan mendukung UMKM. Penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap berbagai aspek tata kelola keuangan. PDB memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PDB dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan karena perusahaan yang

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menguji hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB), Indeks Persepsi Korupsi (CPI), dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Populasi penelitian adalah Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria ketersediaan data yang diperlukan, termasuk data PDB, CPI, dan laporan audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Data PDB dikumpulkan dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyediakan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Data CPI diperoleh dari laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International, yang memberikan penilaian terhadap persepsi korupsi di berbagai daerah. Sementara itu, data kualitas laporan keuangan didapatkan dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data-data ini akan digunakan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, persepsi korupsi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam analisis data, langkah pertama adalah melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dari masing-masing variabel, yaitu PDB, CPI, dan kualitas laporan keuangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Setelah itu, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan, meliputi uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas dengan Glejser, serta uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Tahap akhir adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh simultan antara PDRB dan CPI terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan umum analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Ket:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = PDB

$X_2 = \text{CPI}$

$\alpha = \text{konstanta}$

β_1 dan $\beta_2 = \text{koefisien regresi}$

$\varepsilon = \text{error term}$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Persepsi Korupsi (CPI), dan Opini BPK (kualitas laporan keuangan). Hasil analisis deskriptif menunjukkan karakteristik dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Deskriptif Variabel

	Mean	Std. Dev.	N
PDB	15.16	3.35	10
CPI	36.50	2.01	10
Opini BPK	1.4	0.84	10

Sumber: Data diolah (2024)

Rata-rata PDB selama 10 tahun (2014-2023) yaitu 15.6 (dalam triliun Rupiah) dan standar deviasi 3.35 menunjukkan adanya variasi nilai PDB dari rata-ratanya. Selanjutnya, variabel CPI, nilai minimum yang diperoleh adalah 34 dan nilai maksimum adalah 40, dengan mean sebesar 36,50. Ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di daerah-daerah yang diteliti relatif konsisten dengan standar deviasi 2,01, yang menunjukkan adanya sedikit variasi dalam tingkat persepsi korupsi antara daerah-daerah yang diteliti.

Variabel Opini BPK sebagai indikator kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 2,00 dan maksimum sebesar 4,00. Rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 3,60, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah yang diteliti memperoleh opini keuangan yang baik dari BPK. Standar deviasi sebesar 0,84 menunjukkan variasi moderat dalam opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji menggunakan Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, dengan interpretasi data sebagai berikut:

- Uji Multikolinearitas: berdasarkan nilai tolerance dan VIF, tidak ada multikolinearitas yang signifikan, karena nilai VIF untuk CPI dan opini BPK adalah 1.182 ($VIF < 10$)
- Uji Heteroskedastisitas: analisis scatterplot, tidak terdapat pola tertentu, ini mengartikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas yang signifikan.
- Uji Autokorelasi dari nilai Durbin-Watson sebesar 1.556 menunjukkan tidak ada autokorelasi positif atau negative yang signifikan dalam model.

Regresi Linear Berganda

Output SPSS versi 29 adalah sebagai berikut:

a. Model Summary

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan nilai R square sebesar 0.612, mengartikan bahwa model regresi dapat menjelaskan 62.1% variasi dalam PDB dengan sisanya 37.9% dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model ini.

b. Koefisien Regresi

Hasil dari koefisien regresi dijelaskan sebagai berikut:

- Intercept, merupakan nilai konstanta PDB (49.346) ketika semua variabel independent bernilai nol.
- Koefisien regresi CPI sebesar -0.809, dengan p-value 0.096 yang tidak signifikan (signifikansi 5%), namun mendekati signifikan pada tingkat 10%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit CPI berpotensi menurunkan PDB sebesar 0.089, tetapi secara statistik hubungan ini tidak cukup kuat.
- Koefisien regresi opini BPK sebesar -3.333, dengan p-value 0.013, yang signifikan pada tingkat 5% mengartikan bahwa setiap penurunan dalam opini BPK (misalnya WTP ke WDP) berkorelasi dengan penurunan PDB.

Uji t-Statistic

Nilai t-statistics untuk CPI adalah -2.002 dengan p-value sebesar 0.096. Tingkat signifikansi 5%, p-value ini tidak signifikan artinya CPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB. Sementara nilai t-statistics opini BPK adalah -3.323 dengan p-value sebesar 0.013, pada tingkat signifikansi 5%, p-value ini sangat signifikan terhadap PDB.

Anova (Uji F)

Nilai F-statistic senilai 5.742 dengan p-value 0.033 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Terdapat satu variabel yang memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen.

Diskusi

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) selama 10 tahun adalah 15,16 triliun rupiah dengan standar deviasi 3,35, yang menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas ekonomi antara daerah-daerah yang diteliti. Daerah dengan PDB yang lebih tinggi umumnya memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Variasi ini dapat mengindikasikan perbedaan signifikan dalam kemampuan ekonomi antar daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih baik.

Nilai rata-rata variabel Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 36,50 dengan standar deviasi 2,01 menunjukkan bahwa persepsi korupsi di daerah-daerah yang diteliti relatif konsisten, dengan variasi yang tidak terlalu besar. Daerah dengan nilai CPI yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Sementara itu, variabel Opini BPK sebagai indikator kualitas laporan keuangan memiliki rata-rata sebesar 3,60, yang berarti sebagian besar daerah yang diteliti mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK). Variasi yang relatif moderat (standar deviasi 0,84) mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah memiliki kinerja yang baik dalam penyusunan laporan keuangan mereka, dengan sedikit daerah yang mendapatkan opini yang lebih rendah seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

PDB, CPI, dan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa PDB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini mendukung Teori Pertumbuhan Ekonomi, yang menyatakan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik memiliki sumber daya lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur akuntansi, manajemen keuangan, dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya yang memadai, pemerintah daerah dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Namun, hasil penelitian ini menemukan bahwa CPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dalam model regresi, meskipun mendekati signifikan pada tingkat kepercayaan 10%. Temuan ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa korupsi merupakan hambatan besar dalam pembangunan ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Klitgaard (2001) dan (Lučić et al., 2016). Menurut teori tersebut, korupsi melemahkan pembangunan dengan melemahkan lembaga-lembaga yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh (Lučić et al., 2016) juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara korupsi dan PDB, di mana kenaikan tingkat korupsi (diukur melalui CPI) berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil yang tidak signifikan ini mungkin menunjukkan bahwa hubungan antara CPI dan PDB di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan, memerlukan kajian lebih mendalam. (Haldi, 2023) dan (Lamijan & Tohari, 2022) menyebutkan bahwa efek korupsi mungkin lebih terlihat dalam jangka panjang, terutama ketika kondisi ekonomi daerah dan kebijakan antikorupsi mulai memberikan dampak. Hal ini selaras dengan temuan bahwa meskipun CPI belum berpengaruh signifikan dalam model ini, perubahan CPI dapat mempengaruhi PDB di masa depan, yang pada gilirannya akan memengaruhi tata kelola dan laporan keuangan daerah.

Perbandingan Studi

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ayem & Wulandari, 2023; Muryanto et al., 2022), yang menyatakan bahwa PDB berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Peningkatan kapasitas ekonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Penelitian ini juga mendukung temuan dari (Safida et al., 2023) bahwa tata kelola yang baik berperan penting dalam mendorong transparansi, meskipun dalam konteks penelitian ini CPI belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Fatimah et al., 2020) yang menemukan bahwa CPI memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan

konteks daerah atau waktu penelitian. Faktor-faktor seperti implementasi kebijakan antikorupsi di tingkat lokal, budaya birokrasi, dan variasi dalam penerapan regulasi mungkin memengaruhi hubungan CPI dan kualitas laporan keuangan di daerah-daerah yang berbeda.

Implikasi Praktis dan Teoritis

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi daerah merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan PDB yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, seperti peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, akan berdampak positif terhadap tata kelola keuangan publik.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat Teori Pertumbuhan Ekonomi, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap pengelolaan keuangan publik. Meskipun pengaruh Good Governance yang diwakili oleh CPI tidak signifikan secara statistik dalam penelitian ini, teori tersebut tetap relevan dalam konteks tata kelola keuangan publik. Peran CPI dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan dapat lebih terlihat dalam konteks jangka panjang atau ketika dikombinasikan dengan faktor tata kelola lainnya, seperti efektivitas administrasi dan keterlibatan masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, meskipun literatur sebelumnya menyatakan bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk sampel yang terbatas dan penggunaan CPI sebagai satu-satunya indikator tata kelola, yang mungkin tidak cukup untuk menangkap semua dimensi Good Governance. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu memperluas cakupan sampel dan memasukkan variabel-variabel lain seperti partisipasi masyarakat dan efektivitas administrasi.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik, sementara peran tata kelola dalam mengurangi korupsi masih memerlukan kajian lebih mendalam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaro, E. (2022). Understanding the Corruption Perceptions Index. In V. Charles & A. Emrouznejad (Eds.), *Modern Indices for International Economic Diplomacy* (pp. 233–270). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84535-3_9

- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i1.93>
- Ayem, S., & Wulandari, A. A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Penerapan IFRS Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(7), 724–732. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i7.918>
- Bahri, D. Y., Epi, Y., & Siregar, I. H. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Terhadap Laporan Keuangan. *INVESTASI: Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.59696/investasi.v1i2.17>
- Fatimah, S., Agustinawati, N. P., & Petro, S. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.33084/neraca.v5i2.1418>
- Gamlath, S. (2013). The governance dimension of human development. *Humanomics*, 29(4), 240–259. <https://doi.org/10.1108/H-03-2013-0015>
- Haldi, M. (2023). Analisis Kausalitas Antara Korupsi, Investasi, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(03), 346–368. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.27044>
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). PENGARUH KORUPSI, KONSUMSI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KETERBUKAAN PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1342>
- Iskandar, R., Adhim, C., & Apriani, P. (2024). Kualitas Laporan Keuangan: Peran Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 3(2), 54–61. <https://doi.org/10.54371/jms.v3i2.446>
- Istutik, Lintang, M. C., & Usry, A. K. (2022). PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, AUDIT TENURE, UKURAN KAP DAN LEVERAGE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(2), 221–233. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i2.757>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3, 40. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Lučić, D., Radišić, M., & Dobromirov, D. (2016). Causality between corruption and the level of GDP. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 29(1), 360–379. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2016.1169701>
- Muryanto, T. D., Farida, Y., Ulinnuha, N., Khaulasari, H., & Yuliati, D. (2022). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Matematika Integratif*, 18(2), 157. <https://doi.org/10.24198/jmi.v18.n2.40732.157-166>
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F., & Desmawan, D. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 64–70. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.52>

- Safida, M., Murhaban, M., Naz'aina, N., & Raza, H. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Audit Internal terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 184. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11002>
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). THE EFFECT OF QUALITY FINANCIAL REPORTING ON GOOD GOVERNANCE. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 277-286. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8047>
- Setyobudi, C. R. A., & Setyaningrum, D. (2019). E-government and corruption perception index: a cross-country study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(1), 11-20. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art2>
- Sufyenisa, R., & Khomsiyah. (2024). CORPORATE GOVERNANCE MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 435-442. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19399>
- Wihardja, I., & Jayadi, J. (2023). Hubungan antara Liberalisasi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan Meta Analisis. *Labs: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 28(4), 13-23. <https://doi.org/10.57134/labs.v28i4.63>

LAMPIRAN

Correlations

		PDB	CPI	opiniBPK
Pearson Correlation	PDB	1.000	-.157	-.649
	CPI	-.157	1.000	-.393
	opiniBPK	-.649	-.393	1.000
Sig. (1-tailed)	PDB	.	.333	.021
	CPI	.333	.	.131
	opiniBPK	.021	.131	.
N	PDB	10	10	10
	CPI	10	10	10
	opiniBPK	10	10	10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	df2
1	.788 ^a	.621	.513	2.33528	.621	5.742	2	7

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	Sig.	F Change	
1	.033		1.556

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	62.630	2	31.315	5.742	.033 ^b

Residual	38.175	7	5.454	
Total	100.805	9		

a. Dependent Variable: PDB

b. Predictors: (Constant), opiniBPK, CPI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	49.346	15.961		3.092	.018	11.603	87.088
CPI	-.809	.420	-.487	-1.924	.096	-1.803	.185
opiniBPK	-3.333	1.004	-.840	-3.321	.013	-5.707	-.960

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	CPI	.846	1.182
	opiniBPK	.846	1.182

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	CPI	opiniBPK
1	1	2.817	1.000	.00	.00	.02
	2	.181	3.940	.00	.00	.79
	3	.001	50.321	1.00	1.00	.19

a. Dependent Variable: PDB